

AKAR BENIH KRISIS INDONESIA

Suatu Tinjauan Sejarah dan Tinjauan Ulang Asumsi-asumsi Pembangunan

W.J. Waworoentoe

I do not believe that civilizations are fated to break down, so I begin by exposing the fallacious arguments of the determinists. Having rejected determinist explanations, I look for an alternative. I find that the very process by which growth is sustained is inherently risky: the creative leadership of a society has to resort to social 'drill' in order to carry along the uncreative mass, and this mechanical device turns against its masters when their creative inspiration fails. I then have to account for the failure of creativity, and I ascribe it to the spiritual demoralization to which we human beings seem to be prone on the morrow of great achievements – a demoralization to which we are not bound to succumb and for which we ourselves therefore bear the responsibility. Success seems to make us lazy or self satisfied or conceited. I muster a series of notable historical examples to show how this actually happens and how human beings have erred in each case.

(dikutip dari: *Why have some civilizations broken down in the past?* Dalam buku *A Study of History* karangan Arnold Toynbee, 1972: Oxford University Press and Thames and Hudson Ltd. Dengan catatan kata-kata yang telah dipertebal telah dipilih oleh pengutip)

Garis besar diskusi untuk penyusunan tulisan ini memang sengaja telah memilih kutipan dari buku Toynbee di atas, tidak saja oleh karena suatu tinjauan analisa historis krisis Indonesia dewasa ini memang akan sangat memerlukan suatu kerangka bahasan teoretis, tetapi terutama juga oleh karena observasi atau kesimpulan Toynbee memang terasa akan sangat relevan untuk analisa krisis Indonesia dewasa ini. Walaupun kita tidak sepenuhnya akan menghadapi seluruh konsekuensi kajian 'ambruknya suatu peradaban Indonesia' namun suatu tafsiran terbatas dalam konteks Indonesia mungkin akan cukup bermanfaat.

Dalam pembahasan ini pandangan terhadap teori-teori deterministik langsung akan dielakkan.

Observasi kita akan dimulai pada: "... *the very process by which growth is sustained is inherently risky...*" kelihatannya memang sangat relevan untuk Indonesia terutama pada masa tiga puluh tahun terakhir ini di saat kita memang baru ingin mencoba untuk memasuki tahap 'sustainable growth' itu, sedangkan makin banyak kaidah-kaidah klasik perkembangan itu yang tumbang atau ambruk, sehingga sedikitnya juga menunjukkan betapa besarnya faktor resiko atau kurangnya security dan kepastian pembangunan itu.

Pandangan berikut sebenarnya merupakan tanggapan terhadap suatu atau sekumpulan kebijakan alternatif: "... *the creative leadership of a society has to resort to social 'drill' in order to carry along the uncreative mass, ... and this mechanical device turns against its masters when their creative inspiration fails.*" Jadi kepemimpinan (orde lama maupun orde baru) yang tadinya cukup kreatif, makin lama makin kehabisan akal untuk mengantar massa yang 'kurang kreatif' itu, sehingga memaksakan suatu 'social drill' (seperti antara lain kita lihat dalam penerapan P4 untuk Panca Sila). Sebenarnya observasi ini juga mengandung sedikitnya dua asumsi lagi; pertama, bahwa kepemimpinan pada mulanya memang cukup kreatif dan visioner, dan kedua, proses perkembangan ternyata begitu serakah sehingga dalam waktu yang relatif singkat kekayaan sumber kreativitas ini langsung terkuras habis. Suatu alternatif lain mungkin hanya proses perkembangan yang lebih hemat dan lebih pelan (tapi

sustainable), sehingga tidak usah terperangkap dan termakan oleh 'monster pembangunan' yang telah kita ciptakan sendiri. Hal ini kini mulai terungkap dalam observasi berikut:

"... I then have to account for the failure of creativity, and I ascribe it to the spiritual demoralization to which we human beings seem to be prone on the morrow of great achievements - a demoralization to which we are not bound to succumb, and for which we ourselves bear the responsibility." Kesimpulan Toynbee yang mengatakan bahwa kegagalan kreativitas itu telah disebabkan oleh suatu 'demoralisasi spritual' yang memang agak sukar ditelen oleh masyarakat Indonesia kini, namun hal ini lebih jelas kalau kita baca selanjutnya: *"... Success seems to make us lazy or self satisfied or conceited..."*

Rupa-rupanya keberhasilan ekonomis relatif (orde baru) memang telah menyebabkan suatu kepuasan dan kemalasan yang justru melemahkan daya kreasi atau ketahanan kultural.

Bagaimana pandangan dan asumsi ini kini dapat kita kembangkan akan dicoba dalam analisa dua kasus atau perioda krisis di Indonesia. Pertama, krisis sekitar malaise 1930, dan kedua krisis pada masa Perang Dunia Kedua antara 1940-1945.

Krisis malaise atau depressi sekitar tahun 1930

Krisis ekonomi di sekitar tahun 1930, walaupun pada umumnya dikenal sebagai suatu phenomena pasca perang dunia pertama, dalam konteks Indonesia beranjak dari kemajuan-kemajuan yang terutama telah dicapai oleh penerapan Cultuurstelsel, yang mungkin juga dapat kita tafsirkan sebagai suatu agro-economic boom yang pertama untuk Indonesia. Cultuurstelsel itu sendiri hanya diterapkan selama 40 tahun lebih yaitu antara tahun 1830 sampai tahun 1870, jadi sudah lebih seratus lima puluh tahun yang lampau, sedang krisis tahun 1930 itu baru sedikit lebih dari 65 tahun yang lampau. Tetapi selain suatu wawasan historis maka sebaiknya kita pertanyakan dahulu sampai di mana krisis tahun 1930 dan Cultuurstelsel itu kini masih relevan untuk kita sekarang? Untuk kajian ini maka karangan ini terutama akan menggunakan karangan Chr.L.M.Penders *Indonesia. Selected documents on Colonialism and nationalism* - terutama bab tentang Kultuurstelsel atau Culture System, dan satu karangan yang agak *peripheral* dari J.Otto (dan Harjoto Kunto): *A Minahasan in Bandung - the 1925 City Budget debate, developments in and around Bandung 1930, plans for a new capital and ITB*. Dan suatu karangan dari R.P.G.A. Voskuil *Bandung - Beeld van een stad*.

Pada permulaan abad ke sembilan belas pemerintah Belanda di Indonesia terpengaruh oleh Revolusi di Perancis ingin mulai menerapkan perdagangan, perburuan dan produksi yang lebih bebas. Salah seorang yang pertama kali mengambil inisiatif liberal ini adalah Gubernur Jendral Daendels yang antara lain telah mengurangi kekuasaan feodal dengan menggantikannya menjadi sistem pemerintah sipil yang dibayar dengan gaji. Tapi kepentingan Daendels yang sebenarnya adalah pertahanan terhadap pengaruh Inggris. Pada tahun 1811 Jawa dan Maluku malahan diduduki oleh Stamford Raffles sebagai letnan gubernur Inggris. Raffles jelas sangat kritis terhadap pemerintahan Belanda, sehingga ia juga merubah sistem perpajakan atau penyewaan tanah dari para pribumi. Dalam hal ini para petani pribumi memang bebas memilih tanaman dan menggunakan tenaga mereka, tapi setengah sampai duaperlima hasil mereka masih harus diserahkan sebagai pajak kepada pemerintah. Namun semua usaha-usaha ini ternyata tidak memuaskan sampai akhir pemerintahan antara Inggris itu pada tahun 1814. Masuklah kini Jendral J.van den Bosch yang memang sudah pernah datang ke Indonesia antara 1798-1810, tapi baru mulai bekerja pada tahun 1829.

*"... In October 1828 vd B. was... appointed governor general, with the task of making the colony profitable again to the mother country as quickly as possible. Vd B. departed for the Indies in July 1829 with two million guilders in cash and another two million in credit."*¹

*"Immediately on his arrival, vd B. set out with his usual energy and singlemindedness to introduce his so called **Culture System**, which in many ways signalled a return to the policies and practices of the Dutch East India Company (VOC)."*²

*"In the more fertile areas of Java and later also parts of West Sumatera and North Sulawesi (Minahasa), farmers were forced to set aside one fifth of their land for the production of export crops such as sugar, coffee, indigo, and spices, which were to be delivered to the Netherlands Trading Company for low prices. This company (in which the King invested heavily), had been set up in 1824 in order to further Dutch commerce and trade. It was given the monopoly of the buying, transporting, and selling of government produce on the European market, and also acted as a banker to the Dutch government, granting loans on the security of future crops in Java."*³

*"Vd B. ran Java as a business venture and accordingly kept overheads as low as possible, only allowing government expenditure on projects that would increase profitability, such as improvements in communications."*⁴

*"Soon the chronic budget deficits of the previous half-century were turned into batige sloten (surpluses). And between 1831 and 1877, 832.4 million guilders in budget surpluses were remitted to the Home Treasury, greatly to the benefit of the Netherlands economy as a whole".*⁵

Jelas bahwa catatan-catatan di atas baru memperlihatkan satu segi dari suksesnya Cultuurstelsel itu. Di samping hasil-hasil ekonomis semata-mata maka pengaruh atau akibat-akibat sampingan lainnya juga perlu diperhitungkan seperti kita baca juga:

"... It should be noted that some of the point... Such as the paternalistic concern with indigenous civilization and the need for indirect rule, remained important features of Dutch colonial rule.."

*"The fear, however, that the Culture System would turn the indigenous population into a mass of paupers and drive them into rebellion appears to have been unfounded, at least during the early years of the system ...in spite of considerable sabotaging (or corruption) efforts by both European and native officials (such as the instruction to safeguard the basic interest of the Javanese, like leaving the peasants sufficient time to grow rice and for other means of livelihood), ... his system would also benefit the Javanese people appears to have some foundation. Judging from a marked rise in native consumption of imported goods, particularly textiles, there was a rise in native prosperity until the mid - 1830s."*⁶

¹ Penders, hlm. 7 seperti juga kutipan catatan kaki berikutnya

² ibid Penders hlm.7

³ ibid Penders hlm.7

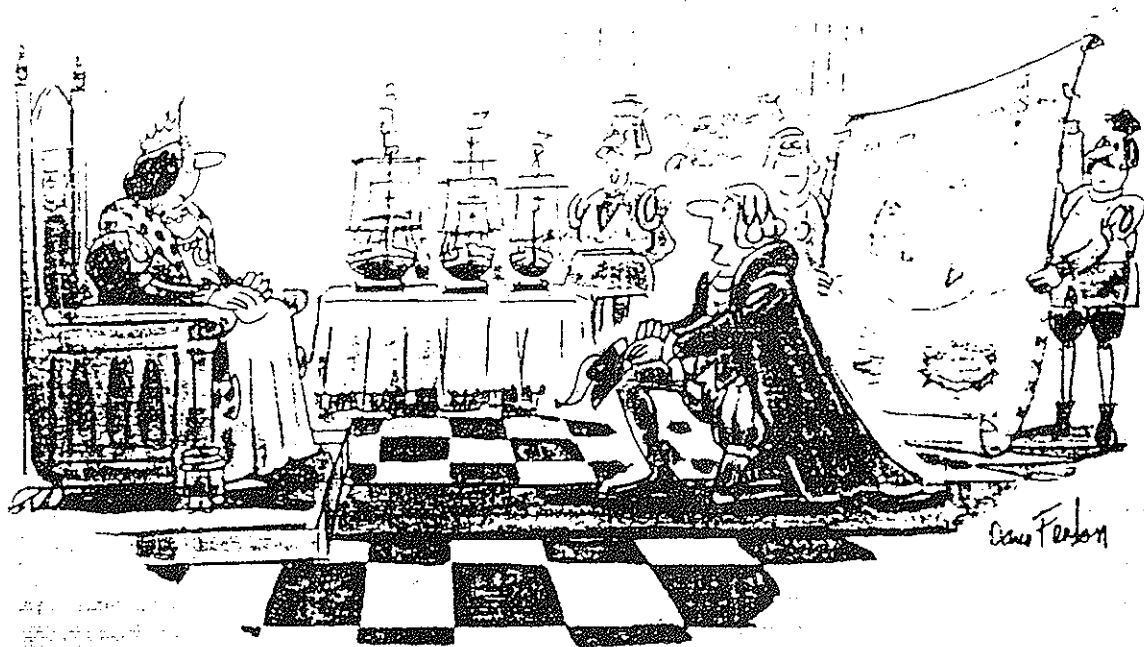
⁴ ibid Penders hlm.7

⁵ ibid Penders hlm.7

⁶ ibid Penders hlm.7

Tetapi bagaimana kita lihat hasil atau pengaruh Cultuurstelsel ini dalam konteks suatu krisis ekonomi seratus tahun sesudahnya yaitu sekitar tahun 1930an itu? Untuk maksud itu kita masih dapat melanjutkan teori yang dikembangkan oleh Toynbee yaitu sukses Cultuurstelsel untuk ekonomi kolonial telah membawa bibit-bibit kemalasan dan kepuasan (*lazy, selfsatisfaction and conceit*) di satu pihak, dan mungkin *opposition dissent* dan *rebellion* di pihak yang dijajah. Semuanya ini memang bibit-bibit krisis yang sangat potential. Sayang sekali tulisan ini tidak dapat mencakup seluruh sejarah ekonomi kolonial sampai tahun tigapuluhan itu, namun barangkali salah satu sorotan atau glimpse dalam masyarakat kota kolonial pasca cultuurstelsel itu dapat kita baca dalam karangan J.Otto: *Een Minahasser in Bandung - Indonesische oppositie in de koloniale gemeente (A Minahasan in Bandung - Indonesian opposition in a colonial community)* yang secara khusus membahas debat penyusunan anggaran kotamadya tahun 1925 di kota Bandung. Baik kita sadari bahwa periode 1922-1930 ini jelas juga periode pada saat krisis depresi dan malaise global itu juga sedang mengamuk di Indonesia. Barangkali studi kasus Bandung ini tidak terlampau relevan untuk suatu analisa asal sebab suatu krisis ekonomi, akan tetapi Otto sebenarnya telah menggambarkan suatu suasana kehidupan kota yang tidak kurang menarik untuk para peneliti politik pengelolaan kotamadya, walaupun khusus dalam deliberasi penyusunan anggaran belanja kota itu. Dalam pengantarnya Otto telah mengutip Ricklefs :

*"Aan het begin van de twintigste eeuw onderging het koloniale beleid in Nederlands Indie de belangrijkste wijziging uit zijn geschiedenis. Niet langer zou de exploitatie van Indonesie het voornaamste motief zijn, maar de zorg voor welvaart en welzijn der der Indonesiers (Ricklefs 1981:143). Tijdens deze periode van 'ethische politiek' vond een aantal bestuurlijke hervormingen plaats gericht op decentralisatie en democratisering. In dat kader werd in grotere steden een gemeentelijk bestuursmodel ingevoerd."*⁷



"Your Majesty, my voyage will not only forge a new route to the spices of the East but also create over three thousand new jobs."

Sumber: *The New Yorker*, October 19, 1992

⁷ lihat Otto, dalam *Excursies in Celebes*. Harry A.Poeze dan Pim Schoorl, eds. hlm.185

Pada permulaan abad ke dua puluh wilayah kolonial Hindia Belanda itu sebenarnya telah mengalami suatu perubahan yang paling utama. Kini bukan lagi eksploitasi sumberdaya Indonesia yang merupakan motif utama melainkan kesejahteraan penduduknya. **Dalam masa 'politik etis' ini beberapa reformasi pemerintah seperti desentralisasi dan demokratisasi telah dimulai.** Untuk beberapa kota besar hal ini terlihat juga dalam pembentukan model pemerintahan **kotamadya** namun mungkin atas dasar model yang terdapat di negara barat.⁸ Bagaimana politik etis ini kini dapat diterapkan dalam pemerintah kotamadya Bandung, kini menjadi perhatian Otto: *"In deze bijdrage staat de vraag centraal of en zoja hoe, binnen het koloniaal gemeentelijke bestel de belangen van de autochtone bevolking door haar eigen vertegenwoordigers konden worden bepleit."*⁹ Perhatian dan pertanyaan sentral tulisan ini adalah bagaimana kepentingan para warga pribumi itu dapat diperjuangkan, oleh para wakil wakil mereka sendiri dalam dewan kota itu.

Walaupun karangan Otto tidak mengandung data yang langsung relevan terhadap masalah sentral analisa krisis tahun 1930an itu, namun beberapa aspek mungkin dapat kita kaji dalam kaitan konteks teoretis *'creative leadership'*, *'social drill'*, *'uncreative mass'* ataupun *'spiritual demoralization'* yang telah dikemukakan oleh Toynbee. Untuk maksud ini secara sangat terbatas ingin kita kutip dua pembahasan dalam debat anggaran belanja kota Bandung tahun 1923 itu:

Pertama pandangan anggota dewan kota Darnakoesoema¹⁰,

*"Sedert jaren, vooral den laatsten tijd, wordt in en buiten dit college beweerd, dat de 'inlander' in de gemeente Bandoeng nagenoeg niets bijdraagt in de gemeentehuishouding. Wij erkennen, dat wij nog leerlingen zijn in de gemeente politiek, maar wij doen ons best op deze politieke school. Het meegegeven huiswerk wordt vlijtig bestudeerd. Wij zijn aan het uitrekenen gegaan. Het resultaat hiervan, Mijnheer de Voorzitter, stemt ons verdrietig, ja stemt ons bitter. Hoe of ook de argumenten luiden, van welke kant ze ook mogen komen, om het naar mijn overtuiging billijke verzoek af the wijzen, het standpunt dat ik te deze inneem namens hen die in mij zien een vertegenwoordiger in dit college, kan niet gewijzigd worden, tenzij de Raad kan aanwijzen wegen om aan onze wenschen tegemoet te komen."*¹¹

Hal ini pada hakekatnya menyangkal bahwa kaum pribumi dalam tata kotamadya itu tidak menyumbang sesuatu, karena walaupun masih belajar dan sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan rumah, kita sudah melakukan perhitungan yang seksama dengan kesimpulan yang sangat menyedihkan. Selanjutnya Darnakoesoema mengambil suatu perumpamaan dari 'kampung' pribumi dalam kota Bandung:

"De kampong is te beschouwen gelijk een vondeling die zich echter verheugt in het bezit van een gezonden vader en een niet ziekeleijke moeder. Voor vadertje Gouvernement en moedertje Gemeente mag, neen moet het kind werken. Maar vraagt het aan vader om kleeven en

⁸ Undang-Undang Decentralisatie 1903 tidak banyak menjelaskan tentang fungsi dan tugas Kotamadya itu, namun dalam Instellingsordonantie Gemeente Bandung (Peraturan Pembentukan Kotamadya Bandung - Lembaran Negara No. 121 tahun 1906) telah dijelaskan empat fungsi utama: a). pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan jalan umum taman dan segala perlengkapan seperti jembatan, saluran, sampai air minum dan pembuangan air; b).pembuangan sampah; c).pemadam kebakaran, pembangunan dan pemeliharaan kuburan umum. Hal-hal ini semuanya di samping hak untuk menarik pajak dari warga kotanya.

⁹ ibid Otto, hlm. 185

¹⁰ Mas Darnakoesoema adalah seorang wartawan nasionalis yang juga anggota Sarekat Islam, Boedi Oetomo, Insufinde dan ISDV atau Himpunan Sosial Demokrat. Sebagai wartawan *Goentoer* di Semarang (1914) dan setelah itu *Pertimbangan* di Bandung sejak 1916 juga anggota dewan kota.

¹¹ ibid Otto, hlm. 203

verzorging, dan luidt het antwoord: "Ik heb geen geld". Pruilt zij bij moder met het zelfde verzoek, dan klinkt het antwoord: "Wel, wel papa's kind moet dat alles aan pappie vragen".¹²

"Kampung itu adalah anak tiri yang walaupun punya ajah (Gubernemen) yang sehat, dan ibu (Kotamadya) yang pasti tidak sakit, kampung itu tetap harus kerja. Tapi kalau kita perlu *sandang* dan *pangan* maka ajah mengatakan 'tidak punya uang', sedangkan ibu hanya akan menyerahkannya lagi kembali ke tanggungan bapak."

Sebelumnya kita menilai atau menganalisa observasi di atas maka sebaiknya kita juga mengkaji pembahasan anggota dewan kota Ratulangi¹³ yang sedikitnya mencakup delapan belas halaman. Menurut Otto maka betoog atau pembahasan Ratulangi itu secara garis besar mencakup enam bagian: pertama suatu analisa sosial psikologis dari masyarakat kolonial itu, kedua suatu pernyataan dukungan terhadap kesimpulan Darnakoesoema, ketiga, telah diidentifikasi sebelas bentuk sumbangan para pribumi pada kas kota, keempat, atas dasar memori walikota sendiri telah dikemukakan juga sebelas prestasi untuk kepentingan penduduk pribumi, kelima, telah dianalisa dasar-dasar etis dari politik agraris atau lahan, sedangkan terakhir diulang lagi sebagai kesimpulan umum, dukungan pada saran Darnakoesoema. Barangkali pembahasan atau analisa ini merupakan analisa sosio-psikologis dan ekonomis pertama masyarakat urban kota di Indonesia pada zaman kolonial itu.

"...projecteert zich in de gemeentepsyche zoodanig dat deze geconstitueerd is uit twee massa-psychologieen, die ieder zelfstandig en vrij, dus onafhankelijk van elkander ... hier samengaand, ginds tegenelkaar optornend in hun aspiraties zijn twee maatschappelijke krachten, die in iedere rationeele gemeentepolitiek behoorlijk uitgebalanceerd dienen te worden. Wordt het evenwichtssysteem naar een richting te ver verschoven, dan veroorzaakt dit maatschappelijke spanning, die voorkomen moet worden omdat wordt een zekere drempelwaarde der verschuiving overschreden, kleine aanleiding zal kunnen voeren tot ongewenschte stoornissen van het maatschappelijke leven".¹⁴

Jadi jikalau nilai ambang keseimbangan psikologis ini dilampau maka hal ini secara mudah akan mengakibatkan gangguan atau krisis yang tidak diinginkan. Jadi berdasarkan analisa Ratulangi ini maka **kegoncangan atau krisis yang mungkin akan terjadi itu akan terutama disebabkan oleh kehilangan keseimbangan dalam kehidupan psikologis masyarakat kolonial ini.** Salah satu akar atau benih krisis sudah dapat kita temukan, tetapi bagaimana analisa kita terhadap kepemimpinan kreatif, massa yang kurang kreatif, 'social drill' dan akhirnya demoralisasi spiritual yang disebabkan kegagalan kreativitas itu?

Sepintas lalu masyarakat Bandung yang digambarkan sekitar tahun tigapuluhan itu justru kebalikan dari keadaan di atas: kepemimpinan sosial pemerintah kolonial justru yang kurang kreatif, sedangkan masyarakat pribumi yang masih belajar berkotamadya itu sudah menunjukkan prakarsa kreativitas yang sangat tinggi yang samasekali tidak memerlukan 'social drill' dan mungkin mustahil akan menghadapi suatu demoralisasi spiritual. Dengan demikian maka masyarakat pra merdeka di Bandung itu memang dalam kategori yang berbeda daripada yang digambarkan oleh Toynbee itu. Baiklah hal itu kita lihat dalam penafsiran perkembangan masyarakat Indonesia itu selanjutnya.

¹² ibid Otto, hlm. 203

¹³ Dr. G.S.S.J. Ratu Langie adalah juga seorang wartawan yang radikal, setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda dan Swiss, mula-mula guru ilmu alam dan pasti di Yogyakarta dan setelah itu memimpin suatu perusahaan asuransi di Bandung. Selain itu ia juga menjabat sebagai anggota dewan kota.

¹⁴ ibid Otto, hl. 205 dengan kata-kata yang dipertebal oleh penulis

Sebagai pelengkap karangan Otto tentang Bandung, maka dapat juga kita sebutkan beberapa laporan atau karangan lain yang kesemuanya sebenarnya mencakup masa kesejahteraan pasca Cultuurstelsel yang lazimnya dinamakan periode masa Politik Etis¹⁵ yang kurang lebih mencakup seluruh periode terakhir zaman kolonial dari tahun 1900 sampai dengan 1940. Aliran 'ethische politiek' ini terutama digerakkan oleh kalangan sosialis dan agama neo calvinist dan katolik di negeri Belanda. Walaupun aliran 'ethische politiek' itu sebenarnya masih dapat kita anggap sebagai suatu kebijakan atau politik ekonomi, namun ciri-ciri sosialnya itu lebih dikenal. Tiga unsur yang dikembangkan secara innovative adalah: "*irrigation, emigration and education*".¹⁶ Jadi barangkali ciri-ciri ini sedikitnya justru telah mengurangi atau menunda proses yang secara radikal menuju ke suatu perlawanan sebagai akibat langsung suatu krisis. Tetapi baik kita sadari juga bahwa aliran Politik Etis sebenarnya harus kita tafsirkan sebagai suatu reaksi terhadap politik kolonial yang tadinya semata-mata mengutamakan keuntungan ekonomis bagi si penjajah dengan Cultuurstelsel-nya itu, jadi memang bukan sebagai suatu protes radikal tapi semacam ameliorasi atau pelunakan terhadap politik kolonial keras itu. Dengan demikian maka kasus kolonial Indonesia memang tidak sepenuhnya akan mengikuti proses yang dimodelkan oleh Toynbee itu.

Sebaiknya kita tinjau juga periode yang masih tersisa yaitu tahun tigapuluhan dan bagaimana sebenarnya implikasi krisis tahun tigapuluhan itu. Untuk maksud ini sebenarnya paling tepat kita perpanjang saja kajian kita terhadap studi kasus kota Bandung yang telah dimulai dengan latarbelakang masa Cultuurstelsel atau peran kota Bandung dalam konstelasi hinterland perkebunan-perkebunan besar di sekitarnya, serta karangan Otto yang secara sangat menarik telah menggambarkan peralihan sistim pemerintah kotamadya Bandung itu.

Perpanjangan kajian ini paling mudah kita pelajari dalam buku *Bandoeng - beeld van een stad*, karangan R.P.G.A.Voskuil dengan bantuan Heshusius, van der Hucht, Polle dan Spanjaard. Sayang sekali buku yang mencakup seluruh sejarah perkembangan kota Bandung mulai dari pra-sejarah sampai tahun 1960 itu tidak secara khusus menganalisa krisis tahun 1930an itu. Bab kedua yang dinamakan *Bandoeng 1906-1940: een moderne koloniale stad*, memang mencakup juga satu sub bab: Tahun Duapuluhan dan Tigapuluhan: aspek dan lembaganya (*De jaren twintig en dertig; aspecten en instellingen*) namun sebenarnya tidak menggambarkan implikasi suatu krisis ekonomi yang telah melanda seluruh ekonomi dunia – malahan justru menggambarkan suatu kemajuan yang sangat pesat¹⁷.

Dalam sub bab ini dapat kita baca antara lain:

*"Als eerste project kwam reeds in 1920 een modelkampong op Astana Anjar in de zuiderstad gereed. In 1921 volgde de kleinwoning bouw op Tjihapit, in het nieuwe noordoostelijk stadsdeel van Bandung, met 127 woningen en twaalf toko's"*¹⁸. Tot het begin van de jaren

¹⁵ Lihat juga bab *The Ethical Policy, 1901-1942* dalam buku *INDONESIA-selected documents on Colonialism and Nationalism, 1830-1842*, karangan Chr. L.M. Penders

¹⁶ Walaupun ketiga unsur atau ciri ini kelihatannya sangat spesifik, namun sebenarnya juga menggambarkan suatu strategi yang cukup komprehensif dan integral: irigasi menekankan suatu kebijakan yang sekaligus ingin meningkatkan produktivitas pertanian padi sawah. Usaha pekerjaan umum teknis, kebijakan emigrasi atau transmigrasi secara demografis ingin menyebar penduduk secara lebih seimbang, serta edukasi jelas merupakan kebijakan peningkatan kecerdasan dan ketrampilan.

¹⁷ Sebenarnya dalam konteks krisis depresi atau malaise tahun 1930, beberapa rencana bagaian kota Bandung seperti daerah perumahan di Andir, sekitar pasar Cihapit, dan juga di sebelah selatan (Astanaanyar), seperti kita baca dalam *Het Gemeentelijk Grond-, Bouw en Woningbedrijf: kleinwoningbouw en kampongverbetering*.

¹⁸ Memang cukup mengagumkan bahwa pada tahun duapuluhan Bandung sudah dapat merencanakan perumahan murah yang lengkap dengan persediaan lingkungan masyarakat dari suatu kota yang modern.

dertig, toen de wereldcrisis verdere activiteiten op dit terrein voorlopig onmogelijk maakte, werden in totaal ca 800 kleine woningen afgeleverd door het Gemeentelijk Woningbedrijf.”¹⁹ Rupanya prestasi Perusahaan Tanah dan Bangunan (Gemeentelijk Bouwbedrijf) ini pada tahun duapuluhan ini cukup mengesankan, walaupun kapasitas ini pada waktu krisis dunia tahun 1930 ini sangat merosot. Seperti juga kita baca selanjutnya:

*“Zoals in andere Indische steden is het echter in Bandung in de vooroorlogse jaren, mede als gevolg van de crisistijd, niet meer gekomen tot kampongverbeteringsprojecten op een schaal die de problemen op dit vlak tot een beheersbaar niveau hadden kunnen terugdringen.”*²⁰

Jadi berhubungan dengan krisis, maka proyek-proyek perbaikan kampung yang memadai ini memang tidak dapat dilanjutkan, sedangkan pada akhirnya kita juga melihat suatu catatan terhadap prakarsa untuk memindahkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan²¹ ke Bandung yang tidak dapat dilaksanakan.

*“In Bandung, aldus de strekking van de gemeentelijke nota, kon men er achteraf begrip voor hebben data het Gouvenement in 1930 onder druk van de economische malaise niet had kunnen besluiten tot uitvoering van de voorgenomen verplaatsing van het departement van Onderwijs en Eeredienst – ondanks het gunstige aanbod van voorfinanciering door de gemeente Bandung tot een hoogte van liefst f 625.000 en de gratis beschikbaarstelling van een terrein van niet minder dan 15ha!”*²²

Hal ini cukup menggambarkan ambisi dan inovasi pemerintah kota Bandung pada waktu itu yang walaupun juga mengerti keprihatinan pemerintah pusat kolonial karena malaise ekonomi tahun 1930 itu, malahan telah memberanikan suatu *voorfinanciering* atau pendanaan awal dan penyediaan lahan.

Masa Krisis selama Perang Dunia Kedua

Sebenarnya masa Perang Dunia Kedua sejak tahun 1940 sampai tahun 1945 itu, tidak sepenuhnya kita dapat tafsirkan sebagai suatu masa krisis ekonomi. Jelas masa ini merupakan suatu masa yang sukar karena tidak sedikit penderitaan dan pengorbanan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, namun memang kesukaran-kesukaran ini tidak semata-mata dianggap sebagai kesukaran ekonomi. Jelas juga bahwa banyak sekali karangan yang telah disusun tentang masa ini, namun untuk keperluan kita sekarang akan dibatasi pada karangan-karangan yang terkumpulkan dalam suatu workshop *The Legacy of Dutch and Japanese Rule in Indonesia: Myths and Realities* yang telah diselenggarakan di Leiden dan Amsterdam pada tahun 1994, yang telah dipublikasikan dalam suatu laporan *JAPAN, INDONESIA AND THE WAR, myths and realities*.²³

Untuk keperluan kita selain pengantar yang telah disusun oleh para editor maka tiga karangan khusus yang dapat kita pelajari adalah: *Modern Japan and Indonesia - The dynamics and legacy of wartime rule*, karangan Goto Ken'ichi, *The Formation of the pribumi business elite in Indonesia, 1930-1940s* karangan Peter Post, dan *Rice Shortage and Transportation* karangan Kurasawa-Inomata Aiko.

¹⁹ Lihat Voskuil, hlm. 39

²⁰ ibid Voskuil, hlm. 40

²¹ Kita semuanya mengerti bahwa pemindahan Verkeer en Waterstaat atau Pekerjaan Umum ke Gedung Sate sudah berhasil sebelumnya (sejak 1920).

²² ibid Voskuil, hlm. 45

²³ Dalam *Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal. Land en Volkenkunde* 173, KITLV Press, Leiden 1997, edited by Peter Post and Elly Touwen Bouwsma

Untuk suatu kerangka berpikir atau *basic frame of reference* dapat kita gunakan perbandingan gaya pemerintahan yang telah dirumuskan oleh Goto Ken'ichi :

*"In their style of rule, too, there was a marked difference between the Netherlands and Japan. Except for the First World War period, Dutch rule was a peace-time regime governed by rationalism, in what Anderson called 'a calm businesslike, bourgeois style. Rather than applying the apparatus of coercion, the Dutch administration dealt with the ruled through perintah halus (gentle orders). Japan's military administration presented a very different picture, partly because it was conducted in conjunction with the prosecution of the war, and it was characterized by ideological, fanatical romanticism. Therefore Japanese military men dealt with Indonesians in a kasar (rough, crude) fashion symbolized by the practice of 'face slapping'."*²⁴

Goto dalam karangannya selanjutnya membahas perubahan-perubahan dalam masyarakat Indonesia selama Perang Pasifik atau pendudukan Jepang itu secara struktural ekonomis maupun secara psikologis:

"The Indonesian economy prior to the Pacific War was incorporated into and dependent on the world trade structure centring on its suzerain, the Netherlands, and other Western powers. The Japanese military administration put an end to these Western dependent economic relations and industrial policies and began reorganize Indonesia into its autarchic 'new economic order' focusing on Japan. Attempts to bring about a quick shift from plantation based export oriented economy to one concentrating on the production of foodstuffs to meet wartime needs caused all kinds of economic confusion. From 1943 the compulsory delivery of rice was more strictly enforced, exerting direct pressure on the daily lives of the peasants and provoking frequent rural revolts in various parts of Indonesia."

*"Even before the war, Japan had viewed Indonesia as a repository of abundant human and material resources, so it was natural that the Archipelago should become a major object ... in line with the three principles of military administration: 'preservation of peace and order; the securing of vital resources; and local self-sustenance'."*²⁵

Kita mengetahui dan menyadari bahwa tujuan-tujuan pemeliharaan ketertiban dan keamanan, menjamin sumberdaya vital maupun swa sembada lokal di atas memang tidak begitu mudah dicapai, seperti juga telah diakui oleh pemerintah pendudukan Jepang yang dalam salah satu suatu dokumen yang mengatakan bahwa *'the effect of the war will inevitably make the lives of the local people difficult'*. Penderitaan ini lalu hendak dibenarkan oleh karena Jepang sebagai imbalan akan membina bangsa Indonesia *'by bestowing on them spiritual enlightenment needed to compensate for the material difficulties they suffer'*.²⁶ Seakan-akan kemerdekaan Indonesia itu kita telah capai dengan membayar kesukaran atau penderitaan kita selama perang dunia kedua itu. .

Salah satu aspek yang agak berbeda dari periode dasawarsa tigapuluhan adalah mulai berkembangnya usaha pribumi Indonesia yang telah dipelajari oleh Peter Post dalam karangannya *The formation of the pribumi business elite, 1930s-1940s*. Walaupun karangan ini sangat menarik dalam konteks perkembangan dunia usaha Indonesia asli, serta pengaruh Jepang dalam perkembangan ini, namun tidak terlampau banyak yang dapat kita ketahui tentang masalah krisis atau kritis dari periode itu. Yang justeru lebih menarik adalah

²⁴ Lihat Goto Ken'ichi *Modern Japan and Indonesia*, hlm. 16

²⁵ ibid Goto, hlm. 19 dan hlm.25

²⁶ ibid Goto, hlm. 25

dasawarsa 1950-1960 atau yang disebut 'Periode Benteng'.²⁷ Sekitar duapuluh lima pengusaha atau pedagang Indonesia yang telah diidentifikasi: Abdul Ghany Aziz (Palembang), Agoes Moesin Dasaad (Sulu Pilipina), Djohor Soetan Perpatih (Padang), Djohan Soetan Soelaiman (Padang), Eddy Kowara (Banten), Frits Eman (Sulawesi Utara), Haji Shamsoedin (Palembang), Hasjim Ning (Padang), Herling Laoh (Sulawesi Utara), Koesmoeljono (Pemalang), R Mardanus (Tapanuli?), Moh. Tabrani (Madura), Nitisemito (Kudus), Omar Tusin, Pardede (Tapanuli), Rahman Tamin (Padang), Rudjito (Ambarawa), Sidi Tando (Palembang?), Soedarpo Sastrosatomo (Pangkalansoesoe), Sosrohadikoesoemo, Soetan Sjahsam, Usman Zahiruddin, Wahab Affan, Ahmad Bakrie (Lampung), Aslam Bakrie.

Karangan Kurasawa-Inomata Aiko *Rice Shortage and Transportation* sebaliknya sangat menekankan penderitaan di Indonesia selama pendudukan Jepang:

"In retrospect, people in Java almost unanimously state that during the Japanese period they suffered from terrible shortages of rice, and urban people often give testimony of seeing many people dying in the streets."

Sebab utama dari kekurangan pangan beras ini dengan sendirinya adalah karena penyerahan hasil padi yang dipaksakan oleh pemerintah Jepang. Namun kekurangan padi dan beras memang tidak semata-mata disebabkan oleh penyerahan paksa hasil itu:

"Of course we cannot attribute the shortage of rice solely to inadequate transportation (and production). In spite of a spirited campaign to increase production, there was a fall in production during the occupation. This was rooted in all sorts of problems: corruption, black marketing, and deliberate hoarding for speculation."

Kurasawa juga menyebut dua usaha untuk meningkatkan transportasi di waktu itu, walaupun tidak semata-mata untuk pengangkutan pangan atau beras. Yang pertama adalah pembangunan jalan kereta api ke wilayah Bayah di Banten Selatan untuk menggali batubara sebagai bahan bakar yang sangat diperlukan pada masa perang ini. Konstruksi jalan kereta api antara Saketi dan Bayah ini mengerahkan banyak romusha atau buruh paksa yang sangat menderita. Usaha kedua adalah pembuatan kapal kayu untuk pelayaran pantai yang ternyata juga tidak memberi hasil yang memuaskan.

Sebagai kesimpulan dari masa penjajahan atau pendudukan Jepang dapat kita kutip lagi Goto Ken'ichi:

"Before the war Indonesians generally had a positive image of Japan. A report drawn up by the Japanese Ministry of Foreign Affairs stated that 'the feelings of the peoples of the East Indies towards Japan ... are generally favourable'", but then an important passage follows:

"If the Japanese forces advance unhindered, and Japan treats the East Indies high-handedly or some ill natured Japanese behave in ways that ignore the traditional customs, thereby offending them, then their feelings toward Japan will be even more filled with hatred than that filled towards the Netherlands".

Ironically, the prediction of the Foreign Ministry came true. In Indonesia today, socialization through school education, the mass media, and family education has made the Japanese occupation period known among the people as 'the darkest hour' in their history. At the same time, the historical view that had nothing but condemnation for 'fascist Japan', which predominated in the 1950s, has receded, giving way to nationalism-based historical

²⁷ Daftar pengusaha Benteng ini antara lain dari Gunseikanbu 1944, Apa dan Siapa 1986, Dataconsult 1992, dan Robison 1986 (50-4).

*interpretation founded on the thesis that Indonesians restored their own dignity and autonomy by enduring that dark hour.*²⁸

Jadi hanya atas dasar kekuatan sendiri Indonesia dapat mengatasi masa sukar pendudukan Jepang itu, serta akhirnya mencapai kehormatan dan kemerdekaannya.

Tulisan ini sampai sekarang baru mencoba meninjau keadaan-keadaan latar belakang yang mungkin merupakan akar dan benih krisis yang kita hadapi di masa lampau maupun di masa kini dan mungkin juga di masa depan. Kita juga telah mencoba untuk mengikuti jejak analisa Toynbee yang juga telah :

“...muster a series of notable historical examples, to show how this actually happens ...”

Tetapi sampai di sini belum dapat kita simpulkan bahwa asumsi-asumsi kita untuk membangun itu memang keliru, sehingga pernyataan akhir

“...and how human beings have erred in each case!” masih saja merupakan pertanyaan.

Sebagai penutup tulisan ini dikutip juga suatu pepatah Cina yang anonim, yang juga telah dikutip oleh Lester C. Thurow dalam bukunya *The Future of Capitalism*, serta oleh Perry Link dalam karangannya *China in Transformation*:

*We are like a big fish that has been pulled from the water
And is flopping wildly to find its way back in
In such a condition the fish never asks where the next flip or flop will bring it
It senses only that its present position is intolerable
And that something else must be tried*

Dalam keadaan kritis seperti ikan di atas maka memang tidak ada manfaatnya kita bertanya apakah gerakan akan terjadi, pokoknya harus diusahakan agar ada perubahan.

²⁸ lihat Goto Ken'ichi *Modern Japan and Indonesia*, hlm.25-26